

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah salah satu kebijakan lama dari pemerintah Indonesia, yang terus dikembangkan sampai saat ini. Salah satu aspek yang terimpas dalam otonomi daerah adalah pendidikan, kondisi dunia yang semakin maju dan berkembang menuntut adanya persiapan yang matang bagi semua manusia untuk masuk di dalamnya terutama dalam hal pembiayaan pendidikan (Amiruddin Siahaan, 2022:65). Dalam konteks dunia pendidikan mekanisme pembiayaan pendidikan menjadi agenda reformasi di dalam sebuah lembaga pendidikan di suatu negara. Mengingat pendidikan merupakan investasi dalam sebuah negara, terutama negara-negara berkembang (Pillay, 2008: 25). Di era Globalisasi saat ini pendidikan Indonesia harus mampu berdaya saing dengan negara lain (Amiruddin Siahaan, 2021: 14). Oleh sebab itu pendidikan harus dijadikan kekuatan untuk membetengi semua masyarakat Indonesia dengan kualitas iman dan taqwa serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan IPTEK, menuntut peningkatan kualitas pendidikan dalam berbagai aspek. Peningkatan tidak hanya terjadi di aspek tertentu tetapi terjadi di semua aspek, mulai dari pemasukan (*input*), proses dan keluaran (*output*). Salah satu tolak ukur yang peningkatan tersebut ada pada perbaikan aspek manajemen yang baik, jika manajemen sudah diterapkan dengan baik maka sebuah organisasi apapun itu termasuk organisasi (lembaga pendidikan) akan mampu menghasilkan kinerja dan hasil karya yang bermutu. Menurut Fattah (2001:11) manajemen mempunyai peran atau membantu menjelaskan perilaku sebuah organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen memiliki hal penting dalam sebuah lembaga pendidikan.

Penerapan sistem mutu manajemen adalah suatu keputusan strategis bagi suatu organisasi khususnya lembaga pendidikan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk pembangunan yang

berkelanjutan. Di dalam lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu manajemen yang baik harus dibarengi dengan pembiayaan pendidikan, jika mutu manajemennya di dalam sebuah lembaga pendidikan kurang baik, dengan melalui mekanisme pembiayaan pendidikan diupayakan agar mutu manajemen tersebut dapat menjadi lebih baik. Pembiayaan pendidikan sering dianggap menjadi masalah utama untuk mendorong madrasah swasta menjadi sekolah unggulan.

Menurut Hasbullah (Irwan, 2019: 73) pembiayaan pendidikan salah satu persoalan yang genting dalam pembangunan sistem pendidikan di Indonesia dan pembiayaan pendidikan salah satu syarat yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan memiliki peranan penting, dan hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan di madrasah tidak akan berjalan secara efektif dan efisien (Dading Murni Anggraini, Desember 2018: 206-212). Madrasah memberikan kontribusi yang signifikan untuk memenuhi standar pendidikan. Sebagian besar peningkatan kualitas pendidikan memerlukan pembiayaan pendidikan, sementara sebagian besar keputusan tentang pembiayaan pendidikan berimplikasi pada pemerataan dan akses. (Jakhongir Shaturaev, juli 2021: 57-58). Pembiayaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan yang saling berkaitan yang di dalamnya memiliki komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan (Ferdinandus, Desember 2013:565-578).

Beberapa studi mengenai pembiayaan pendidikan seperti di Indonesia sendiri pemerintah menyediakan pembiayaan pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan dinas dialokasikan 20% baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembiayaan pendidikan, termasuknya salah satunya Bantuan Operasional Madrasah (BOM) (Dading Murni Anggraini, Desember 2018: 207). Selain itu bukti empirisnya berdasarkan penelitian *The Organisation For Economic Cooperation and Development* dari 65 Negara termasuk Indonesia pembiayaan pendidikan baik itu sekolah negeri ataupun madrasah 65% berasal

dari pemerintah, 31% berasal dari orangtua siswa, 2% donatur, 2% dari sumber lainnya (OECD, 2012:20).

Menurut Ace Sumantri (Mei 2021: 84) ada beberapa mekanisme pembiayaan pendidikan yang digunakan di negara-negara berkembang seperti mekanisme tersebut mencakup kombinasi antara pembiayaan publik dan swasta dengan memiliki tingkat otonomi sambil mengelola sumber daya yang tersedia. Menurut studi terbaru ada tiga model dasar pembiayaan pendidikan yaitu termasuklah model birokrasi, model kolejal, model pasar. Tetapi saat ini banyak yang menggunakan model pasar untuk mendiversifikasikan sumber dana untuk mendapatkan otonomi keuangan (Oleksandr D. Rozhko, April 2019: 96). Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang memadai akan menghasilkan sarana prasarana pendidikan yang baik. Maka dari itu akan membuat peserta didik nyaman dalam belajar sehingga akan meningkatkan mutu pendidikan. Untuk melihat mutu manajemen sebuah lembaga pendidikan harus dilihat dari visi, misi, tujuan dan sasaran sebuah lembaga pendidikan agar mutu manajemennya tetap baik.

Dalam hal pembiayaan pendidikan pemerintah Indonesia telah melakukan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, yaitu meliputi standar kompetensi, isi, proses, pendidik dan tenaga pendidik, sarana prasarana, pembiayaan pendidikan, pengelolaan, penilaian pendidikan, jadi untuk memiliki mutu manajemen harus sesuai dengan standar nasional pendidikan (Efendi, 2019: 42). Sebagai dilaporkan oleh Ahmad Noval (2019:74) pembiayaan pendidikan apalagi di dunia pendidikan Islam terdapat beberapa hal hambatan yang membuat madrasah di pandang sebelah mata seperti hambatan manjerial, hambatan SDM, hambatan ekonomi, hambatan pengembangan pola pikir. Namun tidak selamanya pembiayaan pendidikan yang memadai selalu memiliki kualitas yang baik, karena selain dari pembiayaan pendidikan yang memadai ada juga komponen pendukung seperti motivasi tinggi dari pendidik dan tenaga pendidik (Ulil Albab, Desember 2019:42).

Seperti hasil observasi awal peneliti di MTs Al-Ihya Tanjung Gading dan MTs Surya Agung mutu manajemennya masih rendah sehingga perlu diupayakan meningkat melalui mekanisme pembiayaan pendidikan, seperti sumber pendapatan yang dimiliki oleh sekolah MTs Al-Ihya Tanjung Gading, sumber pembiayaan pendidikan selain dari Pemerintah ada juga yang berasal dari siswa yaitu seperti iuran SPP yang sebesar Rp. 90.000/siswa dan bantuan lainnya. Sedangkan di MTs Surya Agung, madrasah ini sangat membutuhkan beberapa alat atau komponen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran termasuk kelengkapan sekolah. MTs Surya Agung mengelola keuangan atau pembiayaan pendidikan yang bersumber dari infaq, hibah, sedekah, dan bantuan pemerintah yaitu dana BOM (bantuan operasional Madrasah), madrasah tidak memungut biaya sekolah kepada siswa. Tetapi pembiayaan pendidikan tersebut lebih mengedepankan fisik dari pada kualitas, mengingat sekolah yang hanya memikirkan fisik saja sementara permasalahan mutu pendidikan, tenaga pendidik, dan proses pembelajaran tidak di pandang secara intensif

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian tesis yaitu **“Upaya Meningkatkan Mutu Manajemen Melalui Mekanisme Pembiayaan Pendidikan di MTs Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara”**.

B. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan pada: Upaya Meningkatkan Mutu Manajemen Melalui Mekanisme Penetapan Pembiayaan Pendidikan di MTs Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Adapun sub fokus pada penelitian ini yaitu perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan MTs Sekecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, mengevaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu manajemen.

C. Pertanyaan Penelitian

Setelah pemaparan latar belakang di atas maka dapat dibuat pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kordinasi antar pengelola sekolah dalam meingkatkan mutu manajemen melalui mekanisme pembiayaan pendidikan di MTs Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara?
2. Bagaimana Mekanisme Penetapan Pembiayaan Pendidikan di MTs Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara?
3. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Pembiayaan Pendidikan di MTs Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara?
4. Bagaimana Pelaporan Pembiayaan Pendidikan di MTs Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kordinasi antar pengelola sekolah dalam meingkatkan mutu manajemen melalui mekanisme pembiayaan pendidikan di MTs Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
2. Mekanisme Penetapan Pembiayaan Pendidikan di MTs Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
3. Pengelolaan Alokasi Pembiayaan Pendidikan di MTs Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
4. Pelaporan Pembiayaan Pendidikan di MTs Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis dan praktis. Adanya uraian dari manfaat penelitian ini untuk menunjukkan bahwa masalah yang dipilih layak untuk diteliti. Adapun manfaatn yang diinginkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi tentang pembiayaan pendidikan yang ideal khusus untuk tingkat madrasah tsanawiyah di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
- b. Memberikan konsep pembiayaan pendidikan di MTs Sekecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Memberikan masukan kepada kepala sekolah agar senantiasa membuat sistem atau mekanisme pembiayaan pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu manajemen sekolah yang lebih baik.
- b. Guru – guru MTs Sekecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, agar mampu memberikan yang terbaik untuk sekolah dan juga siswa sehingga dapat melahirkan alumni-alumni yang mampu bersaing dengan sekolah lainnya, maka dengan itu mutu manajemennya dapat dikatakan bagus dan baik karena dapat bersaing dengan sekolah lain.
- c. Siswa-siswa MTs Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, dengan mekanisme pembiayaan pendidikan maka mutu manajemen yang baik, siswa akan nyaman dekat keadaan yang ada disekolah baik itu di ketika belajar maupun diluar jam belajar. Sehingga mereka dapat menerima pelajaran dengan baik dan benar.
- d. Sebagai syarat dalam mencapai sarjana Strata dua (S2) dengan gelar Magister Pendidikan (M.Pd).